
SEKRETARIAT TKPKD
KABUPATEN SIKKA

**LAPORAN
PELAKSANAAN
PENANGGULANGAN
KEMISKINAN DAERAH
TAHUN 2024**



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, atas Rahmat dan Bimbingan_Nya, sehingga penyusunan Dokumen Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Kabupaten Sikka Tahun 2024 dapat diselesaikan.

Permasalahan kemiskinan masih menjadi salah satu masalah utama pembangunan di Kabupaten Sikka. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial yakni, kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, korban bencana, dan/atau korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi. Penanggulangan kemiskinan merupakan kebijakan, program dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.

Sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2020, tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota, maka dibentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Sikka Tahun 2025, dengan Keputusan Bupati Nomor 323/HK/2025. Salah satu tugas TKPKD Kabupaten Sikka adalah sebagai penyusun LP2KD. Dalam laporan ini memuat kelembagaan, capaian dan analisis

masalah kemiskinan, program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah dan rencana tindak lanjut penanggulangan kemiskinan.

Akhirnya, semoga LP2KD Kabupaten Sikka Tahun 2024 ini bermanfaat bagi semua pihak pada umumnya serta secara khusus berguna bagi Pemerintah Kabupaten Sikka dalam upaya merealisasikan percepatan penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Sikka guna mewujudkan Masyarakat Sikka yang produktif, kreatif, unggul dan mandiri menuju Maumere Baru.

Maumere, Juli 2025
Bupati Sikka

Juventus Prima Yoris Kago

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GRAFIK	v
DAFTAR BAGAN	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan	2
1.3. Landasan Hukum	3
1.4. Sistematika Penulisan	5
BAB II KELEMBAGAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN	6
2.1. Struktur, Fungsi dan Tugas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan	6
2.2. Anggaran untuk Penanggulangan Kemiskinan	7
2.3. Hambatan dan Tantangan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan	8
2.4. Penanganan Pengaduan Masyarakat	10
2.5. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi untuk Penanggulangan Kemiskinan	11
BAB III CAPAIAN DAN ANALISIS	13
3.1. Persentase Penduduk Miskin	13
3.2. Jumlah Penduduk Miskin	14
3.3. Indeks Kedalaman Kemiskinan	21
3.4. Indeks Keparahan Kemiskinan	22
3.5. Garis Kemiskinan	23
3.6. Program Penanggulangan Kemiskinan	25
BAB IV RENCANA TINDAK LANJUT	55
BAB V PENUTUP	57
5.1. Kesimpulan	57
5.2. Rekomendasi	58

Lampiran

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1. Daftar Perangkat Daerah dan Anggaran Penanggulangan Kemiskinan	7
Tabel 3.1. Sebaran Penduduk Miskin Ekstrem di Kabupaten Sikka	16
Tabel 3.2. Matriks Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Sikka	27

DAFTAR GRAFIK

	Halaman
Grafik 3.1. Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Sikka Tahun 2020 - 2024	13
Grafik 3.2. Posisi Relatif Persentase Penduduk Miskin Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024	14
Grafik 3.3. Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Sikka Tahun 2020 - 2024	15
Grafik 3.4. Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Sikka Tahun 2020 – 2024	21
Grafik 3.4. Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Sikka Tahun 2018 – 2022	22
Grafik 3.5. Garis Kemiskinan Kabupaten Sikka Tahun 2018 – 2022	23

DAFTAR BAGAN

Halaman

Bagan 2.1. Struktur Tim Koordinasi Penanggulangan
Kemiskinan Kabupaten Sikka 6



**Laporan Pelaksanaan
Penanggulangan Kemiskinan Daerah
Tahun 2024**

BAB I

PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang**
- 1.2. Maksud dan Tujuan**
- 1.3. Landasan Hukum**
- 1.4. Sistematika Penulisan**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Definisi kemiskinan menurut Badan Pusat Statistik Indonesia adalah ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Menurut Bank Dunia, kemiskinan adalah kondisi ketika seseorang hidup dengan pendapatan di bawah US\$ 2,15 per hari (standar internasional tahun 2017) sebelumnya menggunakan standar US\$ 1,90 per hari (standar internasional tahun 2011), atau tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar minimum. Definisi kemiskinan menurut *United Nations Development Programme* (UNDP) adalah kekurangan dalam berbagai dimensi kehidupan manusia, tidak hanya pendapatan, tapi juga Pendidikan, kesehatan, akses terhadap layanan dasar, dan kualitas hidup secara umum.

Kemiskinan merupakan tantangan utama yang secara langsung mempengaruhi keberhasilan pembangunan daerah yang berdampak pada rendahnya produktivitas tenaga kerja, keterbatasan partisipasi Masyarakat dalam pembangunan, serta ketimpangan wilayah antar desa. Di sisi lain, kualitas sumber daya manusia juga berdampak karena keterbatasan akses terhadap Pendidikan, Kesehatan, dan Infrastruktur dasar. Penanganan masalah kemiskinan merupakan tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah serta seluruh pemangku kepentingan yang akan berdayaguna secara efektif jika penanganannya dilakukan lintas sektor dan menjadi tanggungjawab multipihak, serta terkoordinasi dengan baik, sehingga ada sinergi dalam pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan. Hal ini sejalan dengan komitmen Pemerintah dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ *Sustainable Development Goals* (SDGs) dimana

salah satu tujuan utama yang ingin dicapai didalamnya adalah Tanpa Kemiskinan, maka strategi penanggulangan kemiskinan harus terintegrasi dalam seluruh proses perencanaan pembangunan, baik dari sisi kebijakan, penganggaran, hingga pelaksanaan program di lapangan.

Dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan daerah diperlukan penajaman yang meliputi penetapan sasaran, perancangan dan keterpaduan program, monitoring dan evaluasi, serta efektifitas anggaran. Selain itu juga diperlukan koordinasi secara terpadu lintas pelaku dalam perumusan dan penyelenggaraan kebijakan penanggulangan kemiskinan, dan penguatan kelembagaan di tingkat Nasional, di tingkat Provinsi maupun di tingkat Kabupaten/Kota.

Dalam rangka sinkronisasi dan upaya mewujudkan sinergitas pelaksanaan program serta pembuatan Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan daerah (LP2KD), telah dibentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Sikka Tahun 2025, sesuai Keputusan Bupati Sikka Nomor 323/HK/2025. Tugas Tim tersebut adalah memberikan dukungan administrasi teknis, memberikan data dan informasi penanggulangan kemiskinan, menyiapkan dan menyusun Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD), rencana aksi daerah, agenda kerja tahunan serta bahan kebijakan lainnya kepada TKPKD.

TKPKD Kabupaten diharapkan mampu menjembatani setiap Satuan Kerja di lingkungannya untuk konsisten melakukan program kegiatan yang berbasis pada penanggulangan kemiskinan daerah sehingga target pengurangan angka kemiskinan yang telah ditetapkan di dalam Rencana Pembangunan dapat tercapai.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Kabupaten Sikka Tahun 2024 disusun dengan maksud :

1. Memberikan gambaran pelaksanaan kegiatan TKPKD Kabupaten Sikka dalam percepatan penanggulangan kemiskinan di tahun 2024;
2. Memberikan gambaran kondisi kemiskinan dan pelaksanaan koordinasi dalam implementasi intervensi program dan kegiatan dalam percepatan penanggulangan kemiskinan di tahun 2024;
3. Memberikan gambaran permasalahan yang dihadapi dalam upaya penanggulangan kemiskinan;
4. Memberikan gambaran harapan yang akan datang dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sikka.

Adapun tujuan penyusunan Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) adalah :

1. Sebagai bahan analisa dan konsolidasi internal Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Sikka;
2. Sebagai bahan evaluasi pelaksanaan dan perencanaan tindak lanjut penanggulangan kemiskinan Kabupaten Sikka;
3. Sebagai dokumen laporan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sikka.

1.3. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);
6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional;
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024 Nomor 7);
9. Peraturan Bupati Sikka Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sikka Nomor 26 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024 Nomor 29).

1.4. SISTIMATIKA PENULISAN

Laporan Kinerja Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Sikka Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Maksud dan Tujuan
- 1.3. Landasan Hukum
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II KELEMBAGAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

- 2.1. Anggaran untuk Penanggulangan Kemiskinan
- 2.2. Hambatan dan Tantangan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan
- 2.3. Penanganan Pengaduan Masyarakat
- 2.4. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi untuk Penanggulangan Kemiskinan

BAB III CAPAIAN DAN ANALISIS

- 3.1. Presentase Penduduk Miskin
- 3.2. Jumlah Penduduk Miskin
- 3.3. Indeks Kedalaman Kemiskinan
- 3.4. Indeks Keparahan Kemiskinan
- 3.5. Garis Kemiskinan

BAB IV RENCANA TINDAK LANJUT

BAB V PENUTUP



**Laporan Pelaksanaan
Penanggulangan Kemiskinan Daerah
Tahun 2024**

BAB II

KELEMBAGAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

- 2.1. Struktur, Fungsi dan Tugas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan**
- 2.2 Anggaran untuk Penanggulangan Kemiskinan**
- 2.3. Hambatan dan Tantangan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan**
- 2.4. Penanganan Pengaduan Masyarakat**
- 2.5. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi untuk Penanggulangan Kemiskinan**

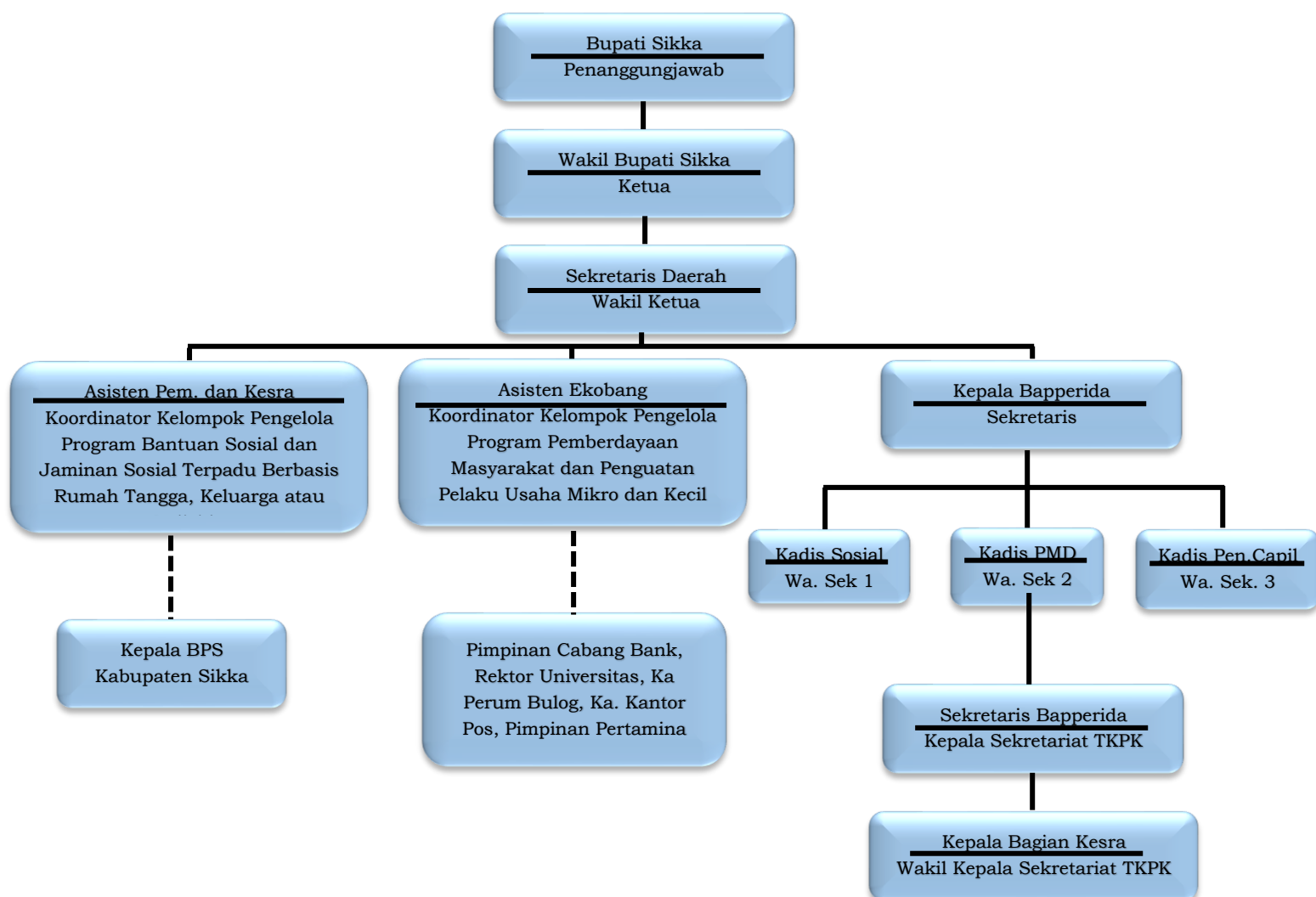
BAB II

KELEMBAGAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

21. STRUKTUR FUNGSI DAN TUGAS TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Struktur Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Sikka, sesuai Keputusan Bupati Sikka Nomor 323/HK/2025, dapat dilihat pada bagan 2.1.

Bagan 2.1.
Struktur Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
Kabupaten Sikka



Fungsi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan antara lain :

1. Penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) dan rencana aksi Kabupaten;
2. Koordinasi penyusunan rancangan RPKD Kabupaten di bidang penanggulangan kemiskinan;
3. Koordinasi pelaksanaan program bidang penanggulangan kemiskinan;
4. Fasilitasi pengembangan kemitraan bidang penanggulangan kemiskinan;
5. Penyusunan instrumen pemantauan, pelaksanaan pemantauan, dan pelaporan hasil pemantauan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan;
6. Pengelolaan pengadaan masyarakat di bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh sekretariat yang mempunyai tugas antara lain :

1. Memberikan dukungan administrasi teknis;
2. Menyiapkan data dan informasi penanggulangan kemiskinan;
3. Menyiapkan bahan RKPD, rencana aksi, dan agenda kerja tahunan; dan
4. Memberikan dukungan bahan kebijakan lainnya kepada TKPKD.

22 ANGGARAN UNTUK PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Anggaran yang dialokasikan untuk mendukung program/kegiatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2024 sesuai tagging program kemiskinan sebesar Rp141.829.157.181.

Alokasi anggaran melalui intervensi Perangkat Daerah dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1

Daftar Perangkat Daerah dan Anggaran Penanggulangan Kemiskinan

No.	Nama Perangkat Daerah	Jumlah (Rp.)
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	55,051,740,814
2	Dinas Kesehatan	59,397,975,074
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	20,549,970

4	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	958,868,440
5	Dinas Sosial	1,035,651,500
6	Dinas Ketahanan Pangan	1,149,746,741
7	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1,005,091,635
8	Dinas Perhubungan	30,237,200
9	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	142,089,850
10	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	366,046,990
11	Dinas Perikanan	12,915,774,599
12	Dinas Pertanian	1,626,889,620
13	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	7,784,671,420
14	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	84,999,680
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	258,823,648
TOTAL		141,829,157,181

Sumber : Olahan Bapperida Kabupaten Sikka, tahun 2025

23. HAMBATAN DAN TANTANGAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Hambatan dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sikka yaitu :

1. Hambatan Perencanaan dan Perumusan

1) Data kemiskinan belum terintegrasi

Implementasi sistem single data kemiskinan berbasis *by name by address* memungkinkan identifikasi yang tepat sasaran terhadap individu atau keluarga yang benar-benar membutuhkan bantuan, akan tetapi data kemiskinan yang terintegrasi melalui DTSEN belum bisa diakses.

2) Pendekatan kebijakan belum komprehensif

Program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat sampai ke daerah terlalu fokus pada bantuan sosial, kurang pada pemberdayaan ekonomi.

3) Kurangnya sinkronisasi perencanaan pusat dan daerah

Tagging program penanggulangan kemiskinan kurang menyasar pada kebutuhan akan pengentasan kemiskinan.

2. Hambatan Implementasi

- 1) Koordinasi lintas sektor lemah, terjadi tumpang tindih antar program.
- 2) Kapasitas kelembagaan daerah terbatas, mulai dari SDM, anggaran dan infrastruktur pendukung belum memadai.
- 3) Anggaran tidak berkelanjutan, program penanggulangan terhenti saat pergantian pemerintahan atau saat refocusing anggaran.

3. Hambatan Sosial dan Kultural

- 1) Resistensi Masyarakat, ketergantungan Masyarakat pada bantuan sangat tinggi, rendahnya partisipasi dalam pengentasan kemiskinan.
- 2) Ketimpangan akses, kelompok rentan (Perempuan, disabilitas, dan penduduk didaerah terpencil) sering tertinggal.
- 3) Norma dan budaya lokal yang membatasi partisipasi dan mobilitas ekonomi.

4. Hambatan Eksternal

- 1) Guncangan ekonomi, inflasi dan kenaikan harga kebutuhan pokok.
- 2) Perubahan iklim dan bencana alam.
- 3) Krisis global yang mempengaruhi perekonomian dunia.

Adapun tantangan yang dihadapi dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sikka antara lain:

1. Tantangan Struktural dan Ekonomi

- 1) Pertumbuhan ekonomi yang tidak merata, manfaat Pembangunan terkonsentrasi di kota.
- 2) Keterbatasan lapangan kerja layak, ekonomi lokal belum tumbuh optimal, masih bergantung pada sektor informal.
- 3) Ketergantungan pada sektor rentan, pertanian masih menjadi sektor unggulan yang bisa terpengaruh musim dan harga pasar.

2. Tantangan Sosial dan SDM

- 1) Rendahnya Pendidikan dan keterampilan Masyarakat membatasi kesempatan kerja dan daya saing.
- 2) Akses Kesehatan yang belum merata, masalah gizi, stunting dan penyakit kronis bisa menghambat produktivitas.
- 3) Ketimpangan gender, Perempuan kadang menghadapi tantangan akses terhadap pekerjaan dan modal.

3. Tantangan Infrastruktur dan Akses

- 1) Akses transportasi dan konektivitas antar wilayah belum merata.
 - 2) Akses terhadap layanan keuangan masih rendah bagi Masyarakat miskin sehingga sulit memulai usaha.
4. Tantangan Lingkungan dan Perubahan Iklim
- Bencana alam dan perubahan iklim merusak sumber penghidupan terutama di sektor pertanian.
5. Tantangan Tata Kelola dan Program
- 1) Data kemiskinan yang belum terintegrasi dan diakses.
 - 2) Ketergantungan pada bantuan sosial tanpa diiringi pemberdayaan.

24. PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT

Penanganan Pengaduan Masyarakat merupakan aspek krusial untuk menampung aspirasi, kepedulian dan pengaduan serta memastikan program penanggulangan kemiskinan berjalan efektif, transparan, dan tepat sasaran. Pengaduan yang responsif dapat menjadi sarana bagi Masyarakat untuk menyampaikan keluhan, masukan, atau laporan terkait pelaksanaan program bantuan sosial dan pemberdayaan.

Sistem pengaduan yang baik akan mempercepat identifikasi masalah di lapangan, seperti data penerima bantuan yang tidak akurat, penyalahgunaan bantuan, atau kurangnya akses informasi bagi masyarakat miskin. Dengan adanya mekanisme pengaduan yang mudah diakses dan responsif, pemerintah dapat melakukan perbaikan secara cepat dan tepat, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap program dapat meningkat.

Penanganan pengaduan dapat dilakukan melalui tingkat desa hingga kabupaten, namun sampai dengan saat ini Pemerintah Kabupaten Sikka belum membentuk Tim Penanggulangan Kemiskinan Desa/Kelurahan (TPK Desa/Kelurahan).

25. PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI UNTUK PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Monitoring dilaksanakan dalam rangka untuk mengetahui perkembangan dan kemajuan, identifikasi dan permasalahan serta antisipasi/upaya pemecahan masalah yang dihadapi oleh masyarakat miskin. Sedangkan kegiatan evaluasi dimaksudkan untuk memberikan penilaian program, kegiatan, dan kebijakan yang telah disepakati.

Prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi kebijakan penanggulangan kemiskinan adalah :

1. Obyektif dan Profesional;
2. Transparan;
3. Partisipatif;
4. Akuntabel;
5. Tepat Waktu;
6. Berkesinambungan;
7. Berbasis Indikator Kinerja;

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan oleh TKPKD Kabupaten Sikka terhadap kegiatan yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan, sebagai berikut :

1. Evaluasi dan Sinkronisasi Dokumen-Dokumen Perencanaan
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026.
 - b. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026.
 - c. Rencana Kerja Perangkat Daerah terkait dengan program penanggulangan kemiskinan.
 - d. Pada tahap ini, TKPKD Kabupaten Sikka dan Perangkat Daerah akan mengevaluasi dan mensinkronisasi dokumen perencanaan untuk memastikan bahwa program-program kemiskinan yang tercantum pada Rencana Aksi Daerah Kabupaten Sikka terakomodir dalam dokumen perencanaan pembangunan.
2. Monitoring dan Evaluasi Program Kemiskinan

Dilakukan untuk melihat sejauh mana perkembangan program yang telah dilaksanakan, sebagai berikut :

- ✓ Dilaksanakan dengan memperhatikan isu gender dan kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, anak dan kelompok rentan lainnya yang dilakukan secara rutin/berkala sesuai kebutuhan (tematik).
 - ✓ Kegiatan monitoring dilakukan setiap bulan dan evaluasi dilakukan setiap triwulan untuk melihat efektifitas pelaksanaan program.
 - ✓ Hasil kegiatan monitoring dan evaluasi dilaporkan pada Wakil Ketua TKPKD Kabupaten Sikka.
3. Tidak lanjut dari kegiatan monitoring dan evaluasi yaitu untuk perbaikan dan penyempurnaan mekanisme pelaksanaan program percepatan.



**Laporan Pelaksanaan
Penanggulangan Kemiskinan Daerah
Tahun 2024**

BAB III

CAPAIAN DAN ANALISIS

- 3.1. Persentase Penduduk Miskin**
- 3.2. Jumlah Penduduk Miskin**
- 3.3. Indeks Kedalaman Kemiskinan**
- 3.4. Indeks Keparahan Kemiskinan**
- 3.5. Garis Kemiskinan**
- 3.6. Program Penanggulangan Kemiskinan**

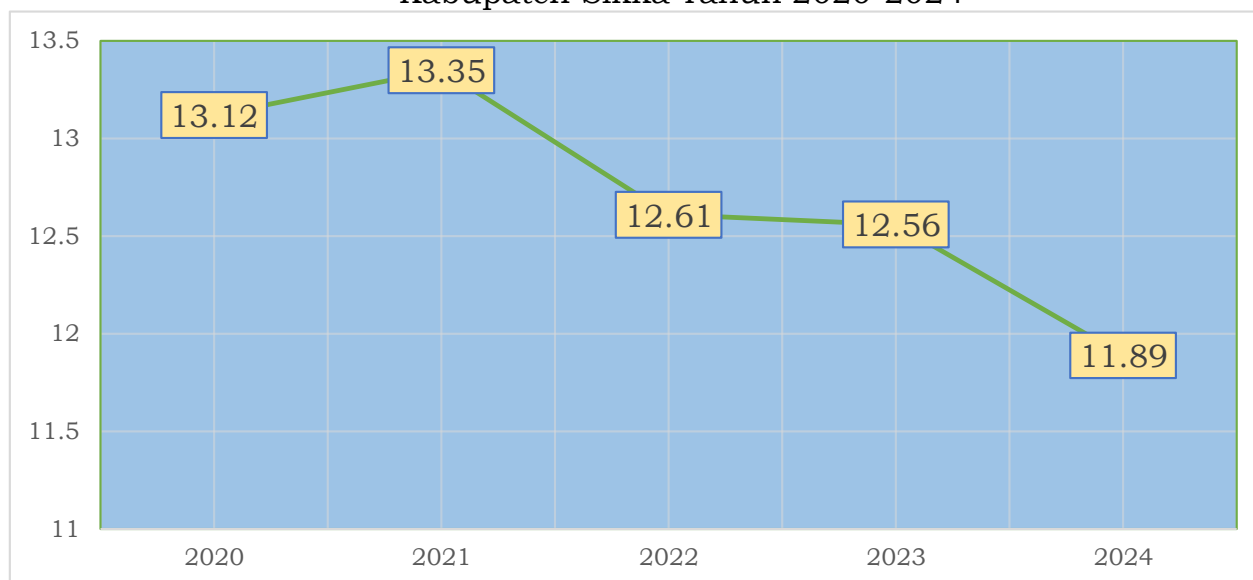
BAB III

CAPAIAN DAN ANALISIS

3.1. PERSENTASE PENDUDUK MISKIN

Persentase penduduk miskin di Kabupaten Sikka selama 5 Tahun dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat pada Grafik 3.1.

Grafik 3.1.
Persentase Penduduk Miskin (%)
Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024



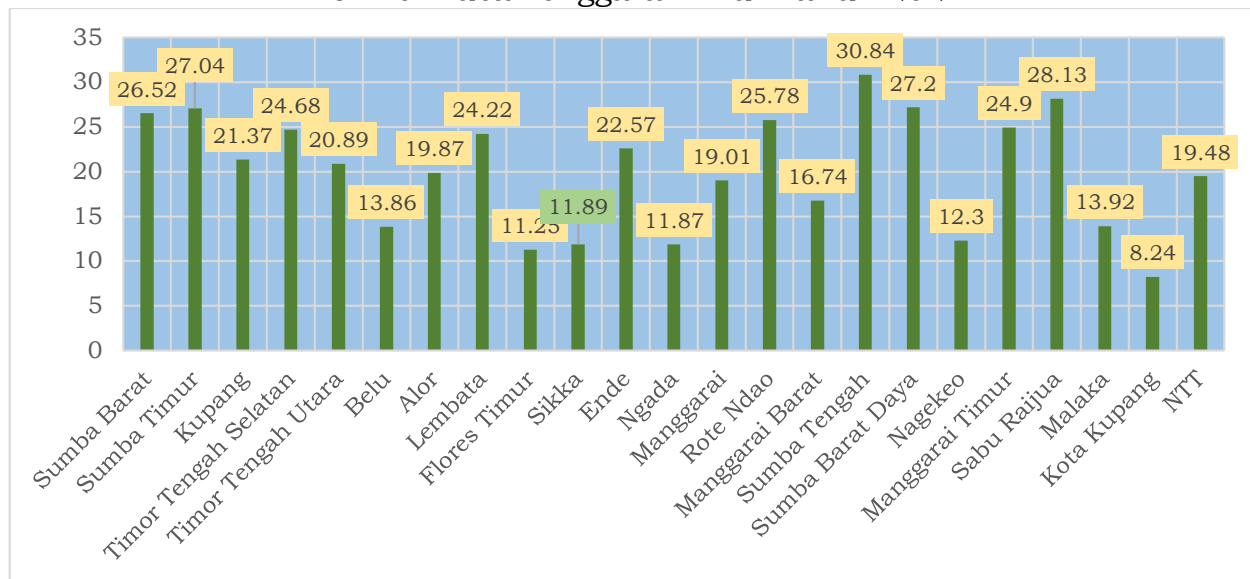
Sumber : Kabupaten Sikka Dalam Angka, 2025

Grafik 3.1 menunjukkan persentase penduduk miskin di Kabupaten Sikka dalam rentang waktu 5 tahun yaitu dari tahun 2020 sampai 2024 mengalami trend penurunan, namun jumlah penduduk miskin bertambah sekitar 910 jiwa, terjadi pada tahun 2021 dan menurun di tahun 2022.

Pada Tahun 2024, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Sikka mengalami penurunan sekitar 2.080 jiwa menjadi 38.730 jiwa atau 11,89% dari jumlah penduduk miskin pada tahun 2023 yaitu sebanyak 40.810 jiwa atau 12,56%.

Jika dibandingkan dengan Kabupaten tetangga, posisi relatif persentase penduduk miskin di Kabupaten Sikka sebesar 11,89% berada dibawah Kabupaten Ende yaitu sebesar 22,57%, dan berada di atas Kabupaten Flores Timur sebesar 11,25%. Posisi relatif persentase penduduk miskin di Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Tahun 2024 dapat dilihat pada grafik 3.2.

Grafik 3.2.
Posisi relatif persentase penduduk miskin
Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024



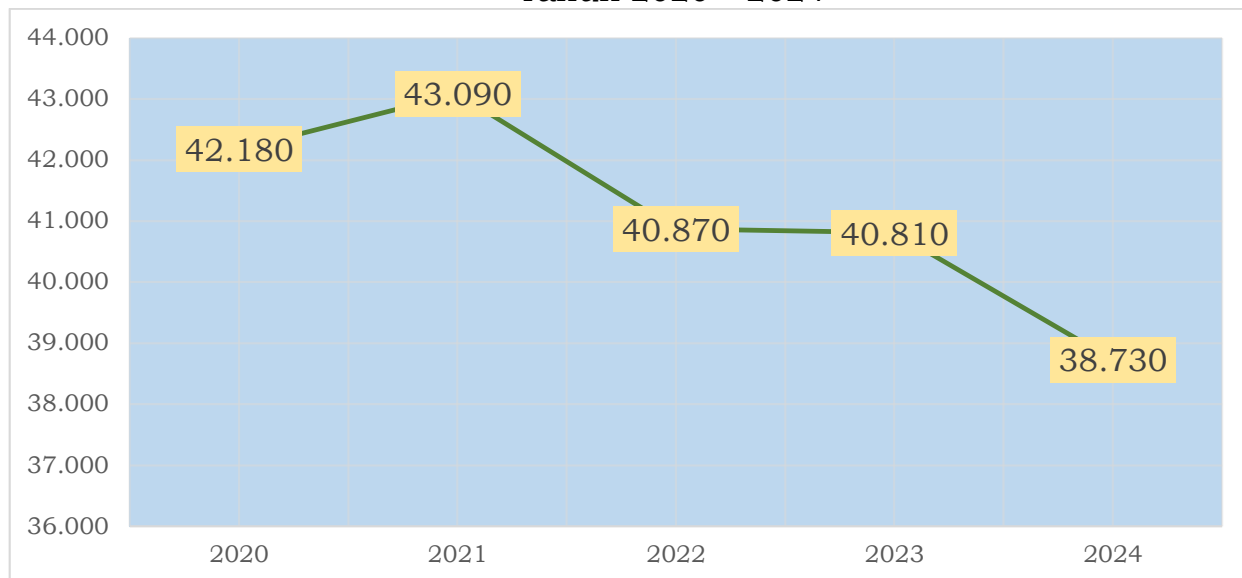
Sumber : Provinsi Nusa Tenggara Timur Dalam Angka, 2025

Grafik 3.2 menunjukan rata-rata posisi relatif persentase penduduk miskin Kabupaten Sikka yaitu sebesar 11,89% berada diatas nasional sebesar 9,0%, dan berada dibawah provinsi sebesar 19,48%.

3.2 JUMLAH PENDUDUK MISKIN

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Sikka pada Tahun 2024 sebanyak 38.730 jiwa. Jumlah Penduduk miskin dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 dapat di lihat pada Grafik 3.3.

Grafik 3.3
Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Sikka
Tahun 2020 – 2024



Sumber : Kabupaten Sikka Dalam Angka, 2025

Dari grafik diatas dapat digambarkan pada Tahun 2024, terjadi penurunan jumlah penduduk miskin sebanyak 2.080 jiwa. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Sikka pada Tahun 2024 sebanyak 38.730 jiwa. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Flores Timur sebanyak 29.740 jiwa dan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Ende sebanyak 62.370 jiwa. Jika dibandingkan dengan kedua Kabupaten ini, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Sikka lebih kecil dari pada Kabupaten Ende namun lebih besar dari Kabupaten Flores Timur.

Pada Tahun 2024, rata-rata jumlah penduduk miskin di Nusa Tenggara Timur sebanyak 1.127.570 jiwa, dan nasional sebanyak 25.200.000 jiwa. Jika dibandingkan dengan rata-rata jumlah penduduk miskin Provinsi NTT, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Sikka lebih kecil dari rata-rata jumlah penduduk miskin Provinsi NTT, namun lebih besar jika dibandingkan secara nasional.

Hasil verifikasi dan validasi melalui Musyawarah Desa dan Kelurahan di wilayah Kabupaten Sikka atas Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem yang dirilis oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, jumlah Keluarga Miskin Ekstrem Desil 1 sebanyak 33.155 jiwa, Desil 2 sebanyak 62.718 jiwa, Desil 3 sebanyak 33.327 jiwa, dan Desil 4 sebanyak 8.799 jiwa, dengan total penduduk miskin di Kabupaten Sikka sebanyak 137.999 jiwa. Sebaran Keluarga miskin ekstrem di Kabupaten Sikka, dapat dilihat pada tabel 3.1.

Tabel 3.1
Sebaran Kepala Keluarga Penduduk Miskin Ekstrem di Kabupaten Sikka

NO	KECAMATAN	DESA/KEL.	DESIL 1	DESIL 2	DESIL 3	DESIL 4	TOTAL
1	ALOK	GUNUNG SARI	0	897	0	0	897
2	ALOK	KABOR	63	245	11	34	353
3	ALOK	KOTA UNENG	395	593	331	4	1323
4	ALOK	MADAWAT	350	511	484	324	1669
5	ALOK	NANGALIMANG	165	459	270	12	906
6	ALOK	PEMANA	50	331	170	483	1034
7	ALOK	SAMPARONG	80	81	386	32	579
8	ALOK BARAT	HEWULI	8	391	266	224	889
9	ALOK BARAT	WAILITI	0	1325	0	0	1325
10	ALOK BARAT	WOLOMARANG	373	2041	181	414	3009
11	ALOK BARAT	WURING	2108	50	20	0	2178
12	ALOK TIMUR	BERU	64	255	204	125	648
13	ALOK TIMUR	KOJA DOI	262	374	138	0	774
14	ALOK TIMUR	KOJAGETE	1272	208	24	20	1524
15	ALOK TIMUR	KOTA BARU	13	40	79	216	348
16	ALOK TIMUR	LEPO LIMA	178	126	128	111	543
17	ALOK TIMUR	NANGAMETING	40	89	72	93	294
18	ALOK TIMUR	PERUMAAN	278	224	146	597	1245
19	ALOK TIMUR	WAIOTI	162	147	44	1	354
20	ALOK TIMUR	WAIROTANG	75	191	76	83	425
21	ALOK TIMUR	WATUGONG	64	175	330	25	594
22	ALOK TIMUR	GONG BEKOR	272	250	228	24	774
23	BOLA	BOLA	76	167	58	5	306
24	BOLA	HOKOR	59	246	864	21	1190
25	BOLA	IPIR	76	114	481	12	683
26	BOLA	WATUKRUS	150	382	8	11	551
27	BOLA	UMAUTA	123	222	934	0	1279
28	BOLA	WOLOKOLI	31	432	261	17	741
29	BOLA	WOLONWALU	112	347	171	4	634
30	BOLA	BURA BEKOR	504	251	26	14	795
31	DORENG	KLOANGPOPOT	33	707	105	0	845
32	DORENG	PELIBALER	65	342	92	55	554
33	DORENG	NENBURA	206	534	37	0	777
34	DORENG	MAHE TANAH	136	407	17	4	564
35	DORENG	WAIHAWA	537	21	10	11	579
36	DORENG	WATUMERAK	136	455	0	46	637
37	DORENG	WOGALIRIT	65	544	82	5	696
38	DORENG	WOLOMOTONG	313	618	190	58	1179
40	HEWOKLOANG	BAOMEKOT	267	503	159	37	966

Sekretariat TKPK
Kabupaten Sikka

41	HEWOKLOANG	HEOPUAT	155	575	187	0	917
42	HEWOKLOANG	HEWOKLOANG	296	550	0	0	846
43	HEWOKLOANG	KAJOWAIR	58	565	408	0	1031
44	HEWOKLOANG	MUNERANA	392	313	58	0	763
45	HEWOKLOANG	RUBIT	377	351	465	41	1234
46	HEWOKLOANG	WOLOMAPA	21	560	49	0	630
47	KANGAE	BLATATATIN	319	464	26	0	809
48	KANGAE	HABI	221	343	74	0	638
49	KANGAE	KOKOWAHOR	140	82	25	0	247
50	KANGAE	LANGIR	0	1085	0	0	1085
51	KANGAE	MEKENDETUNG	163	582	114	20	879
52	KANGAE	TANA DUEN	159	737	351	50	1297
53	KANGAE	TEKA IKU	44	448	406	55	953
54	KANGAE	WATULIWUNG	81	171	238	9	499
55	KANGAE	WATUMILOK	150	307	493	35	985
56	KEWAPANTE	GELITING	30	108	181	0	319
57	KEWAPANTE	IAN TENA	80	141	101	9	331
58	KEWAPANTE	WATUKOBU	52	368	244	19	683
59	KEWAPANTE	KOPONG	63	337	360	19	779
60	KEWAPANTE	NAMANGKEWA	22	756	38	0	816
61	KEWAPANTE	SEUSINA	174	280	4	0	458
62	KEWAPANTE	UMAGERA	85	213	265	6	569
63	KEWAPANTE	WAIARA	136	940	1160	48	2284
64	KEWAPANTE	WAIKOJA	93	168	124	15	400
65	KOTING	KOTING A	25	130	192	10	357
66	KOTING	KOTING B	20	59	0	0	79
67	KOTING	KOTING C	24	144	103	7	278
68	KOTING	KOTING D	6	26	68	28	128
69	KOTING	WATUREPA	18	80	73	0	171
70	KOTING	PAUBEKOR	13	46	361	42	462
71	KOTING	RIBANG	6	79	181	25	291
72	LELA	BAOPAAT	135	162	81	12	390
73	LELA	DU	10	150	98	0	258
74	LELA	HEPANG	478	297	112	43	930
75	LELA	ILIGAI	117	222	436	31	806
76	LELA	KOLIDETUNG	344	449	109	23	925
77	LELA	KOROWUWU	176	116	72	100	464
78	LELA	LELA	221	484	31	0	736
79	LELA	SIKKA	21	452	197	10	680
80	LELA	WATUTEDANG	0	97	288	0	385
81	MAGEPANDA	DONE	428	178	31	12	649
82	MAGEPANDA	KOLISIA	217	215	126	167	725
83	MAGEPANDA	WATURIA	44	245	109	95	493
84	MAGEPANDA	KOLISIA B	214	373	32	3	622

85	MAGEPANDA	MAGEPANDA	239	211	73	0	523
86	MAGEPANDA	WODA MUDE	60	100	22	4	186
87	MAGEPANDA	REROROJA	190	322	315	30	857
88	MAGEPANDA	LEGUWODA	103	34	6	14	157
89	MAPITARA	EGON GAHAR	300	526	89	0	915
90	MAPITARA	HALE	849	268	59	12	1188
91	MAPITARA	HEBING	432	269	113	96	910
92	MAPITARA	NATAKOLI	466	180	306	24	976
93	MEGO	BHERA	169	83	97	449	798
94	MEGO	RATEKALO	89	99	51	17	256
95	MEGO	DOBO	254	164	87	285	790
96	MEGO	DOBO NUAPU'U	38	82	476	9	605
97	MEGO	GERA	192	318	54	24	588
98	MEGO	NDAI MBERE	18	192	186	35	431
99	MEGO	KOROBHERA	0	63	176	424	663
100	MEGO	KOWI	371	321	9	0	701
101	MEGO	LIAKUTU	32	249	459	8	748
102	MEGO	NAPUGERA	24	118	36	4	182
103	MEGO	PARABUBU	34	229	35	0	298
104	MEGO	WOLODHESA	84	91	171	147	493
105	NELLE	MANUBURA	151	188	89	96	524
106	NELLE	NELLE LORANG	13	85	389	0	487
107	NELLE	NELLE BARAT	39	54	56	0	149
108	NELLE	NELLE URUNG	13	139	127	84	363
109	NELLE	NELLE WUTUNG	307	243	11	0	561
110	NITA	BLORO	47	266	274	61	648
111	NITA	LADOGAHAR	104	323	254	25	706
112	NITA	LUSITADA	28	582	91	0	701
113	NITA	MAHEBORA	156	124	18	16	314
114	NITA	NIRANGKLIUNG	561	262	121	4	948
115	NITA	KARAKABU	123	212	293	29	657
116	NITA	TADALADO	222	332	133	5	692
117	NITA	NITA	298	228	69	21	616
118	NITA	NITAKLOANG	169	190	337	233	929
119	NITA	RIIT	22	174	619	9	824
120	NITA	TAKAPLAGER	28	241	138	12	419
121	NITA	TEBUK	75	700	13	2	790
122	NITA	TILANG	365	252	42	23	682
123	NITA	NANGABLO	33	206	303	3	545
124	NITA	WULIWUTIK	292	467	4	6	769
125	PAGA	LENANDARETA	8	267	319	179	773
126	PAGA	MASABEWA	390	159	151	454	1154
127	PAGA	MAULO'O	113	154	50	88	405

Sekretariat TKPK
Kabupaten Sikka

128	PAGA	MBENGU	283	269	145	0	697
129	PAGA	KOTANDELU	182	236	30	0	448
130	PAGA	PAGA	38	56	75	0	169
131	PAGA	LOWOLABO	67	49	5	0	121
132	PAGA	AEBUBU	50	173	15	0	238
133	PAGA	WOLOREGA	65	463	17	21	566
134	PAGA	REGAPU'U	56	427	54	18	555
135	PAGA	REJO	177	25	33	55	290
136	PAGA	WOLOWIRO	43	119	131	10	303
137	PAGA	BEGU	10	153	130	25	318
138	PAGA	WOLOWONA	141	108	5	0	254
139	PALUE	LADOLAKA	43	34	15	6	98
140	PALUE	LIDI	210	0	0	18	228
141	PALUE	MALURIWU	473	0	0	10	483
142	PALUE	KESOKOJA	1055	73	0	0	1128
143	PALUE	ROKIROLE	63	80	13	10	166
144	PALUE	NITUNGLEA	228	382	19	0	629
145	PALUE	RERUWAIRERE	132	268	241	98	739
146	PALUE	TUANGGEO	383	162	5	65	615
147	TALIBURA	BANGKOOR	238	395	256	28	917
148	TALIBURA	MAMAI	93	296	139	98	626
149	TALIBURA	DARAT GUNUNG	8	638	3	4	653
150	TALIBURA	DARAT PANTAI	486	396	12	0	894
151	TALIBURA	HIKONG	79	355	181	1	616
152	TALIBURA	HENGA	45	44	351	172	612
153	TALIBURA	UDEK DU'EN	50	400	213	90	753
154	TALIBURA	KRINGA	770	117	29	0	916
155	TALIBURA	LEWOMADA	86	389	68	0	543
156	TALIBURA	NANGAHLE	278	1689	0	0	1967
157	TALIBURA	LIKONGGETE	69	409	0	0	478
158	TALIBURA	NEBE	159	286	114	21	580
159	TALIBURA	WATU OMOK	339	245	0	0	584
160	TALIBURA	OJANG	0	121	369	153	643
161	TALIBURA	TALIBURA	0	479	30	20	529
162	TALIBURA	WATUBAING	200	151	38	0	389
163	TALIBURA	TIMUTAWA	12	308	86	48	454
164	TALIBURA	WAILAMUNG	75	302	90	4	471
165	TALIBURA	WAIPAAR	68	465	92	61	686
166	TALIBURA	BAOKREMOT	60	198	50	5	313
167	TANAWAWO	BU SELATAN	29	645	74	31	779
168	TANAWAWO	BU BARAT	0	7	374	0	381
169	TANAWAWO	BU UTARA	112	164	22	28	326
170	TANAWAWO	BU NUAPU'U	0	152	29	0	181

171	TANAWAWO	BU WATUWETI	245	365	100	0	710
172	TANAWAWO	DETUBINGA	273	209	140	17	639
173	TANAWAWO	LOKE	458	301	109	58	926
174	TANAWAWO	POMA	99	102	71	34	306
175	TANAWAWO	RENGGARASI	3	737	9	5	754
176	TANAWAWO	TUWA	196	306	214	9	725
177	WAIBLAMA	ILINMEDO	111	197	173	2	483
178	WAIBLAMA	NATARMAGE	0	143	420	7	570
179	WAIBLAMA	PRUDA	329	385	73	0	787
180	WAIBLAMA	WATUMONING	126	126	146	9	407
181	WAIBLAMA	TANARAWA	7	976	0	0	983
182	WAIBLAMA	TUA BAO	70	278	270	4	622
183	WAIBLAMA	WERANG	43	462	561	98	1164
184	WAIGETE	AIBURA	34	838	16	0	888
185	WAIGETE	EGON	16	91	164	100	371
186	WAIGETE	MAHEKELAN	323	171	76	119	689
187	WAIGETE	EGON BULUK	11	277	56	24	368
188	WAIGETE	HODER	103	590	75	21	789
189	WAIGETE	NANGATOBONG	302	453	293	22	1070
190	WAIGETE	POGON	32	799	117	12	960
191	WAIGETE	RUNUT	22	228	576	36	862
192	WAIGETE	WAIRBLELER	7	44	1479	4	1534
193	WAIGETE	WAIRTERANG	49	441	288	7	785
194	WAIGETE	WATUDIRAN	0	35	961	0	996
TOTAL			32475	60310	31857	8676	133318

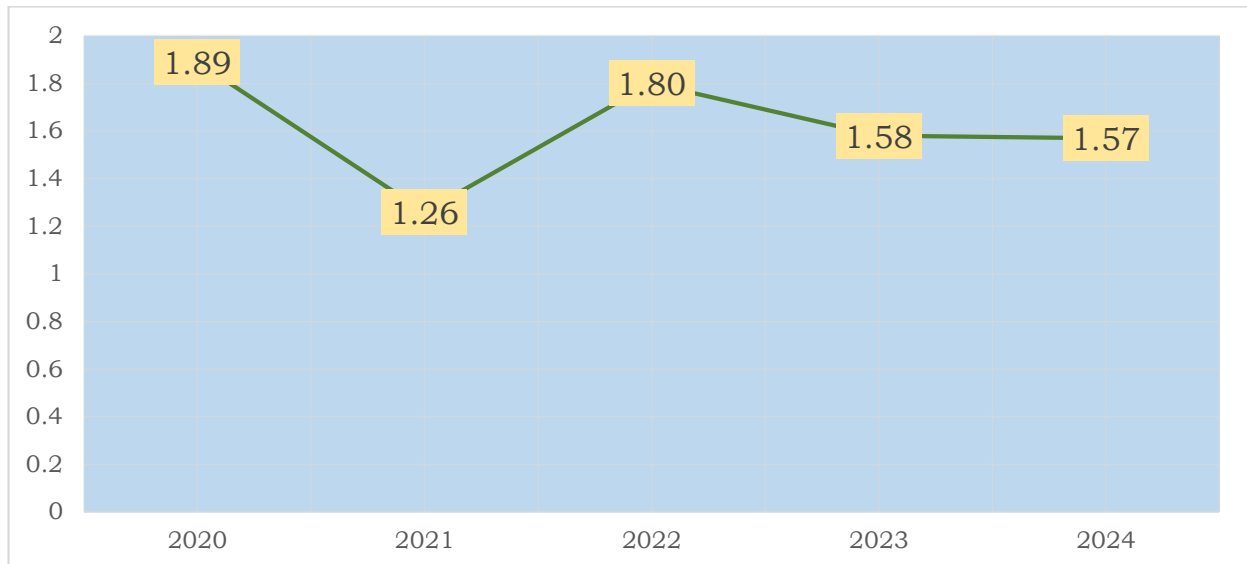
Sumber : Olahan Bapperida Kabupaten Sikka, tahun 2025

Data awal dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, jumlah penduduk miskin Ekstrem Kabupaten Sikka sebanyak 139.102 jiwa, setelah dilakukan verifikasi dan validasi ditingkat Desa dan Kelurahan menjadi 133.318 jiwa, data tersebut sudah termasuk dengan data exclusion error/orang miskin yang seharusnya terdata tapi tidak terdata dalam data. Terjadi pengurangan terhadap data sebanyak 5.784, hal ini dikarenakan ada nama-nama keluarga yang meninggal, pindah, tidak dikenali, ganda dan tidak miskin terdapat dalam data, sehingga setelah dilakukan verifikasi dan validasi data-data tersebut dikeluarkan.

3.3. INDEKS KEDALAMAN KEMISKINAN

Indeks kedalaman kemiskinan merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Indeks kemiskinan Kabupaten Sikka dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 dapat dilihat pada Grafik 3.4.

Grafik 3.4
Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Sikka
Tahun 2020 – 2024



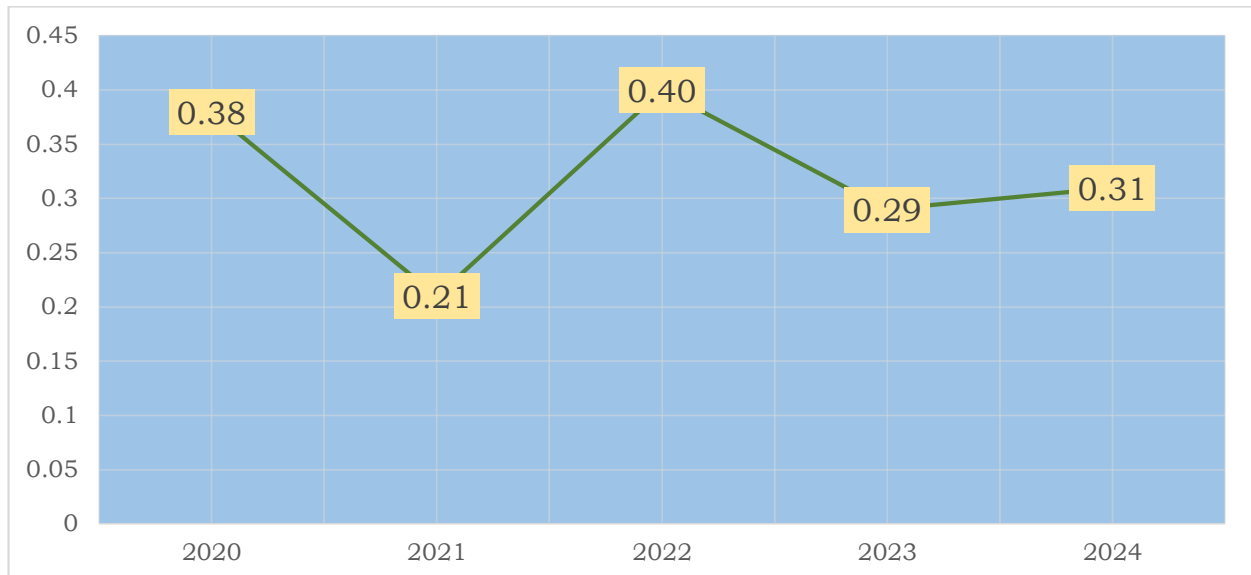
Sumber : Kabupaten Sikka Dalam Angka, 2025

Grafik 3.4 menunjukkan indeks kedalaman kemiskinan Kabupaten Sikka tahun 2023 sebesar 1,58 mengalami penurunan sebesar 0,01 menjadi 1,57 di tahun 2024. Penurunan ini menunjukkan bahwa rata-rata jarak pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan semakin mendekat. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian penduduk miskin mengalami perbaikan kondisi ekonomi, dan lebih dekat untuk keluar dari status miskin apabila tren ini berlanjut.

3.4. INDEKS KEPARAHAN KEMISKINAN

Indeks keparahan kemiskinan memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin, semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Indeks keparahan kemiskinan Kabupaten Sikka dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 dapat dilihat pada Grafik 3.5.

Grafik 3.5
Indeks Keparahkan Kemiskinan Kabupaten Sikka
Tahun 2020 – 2024



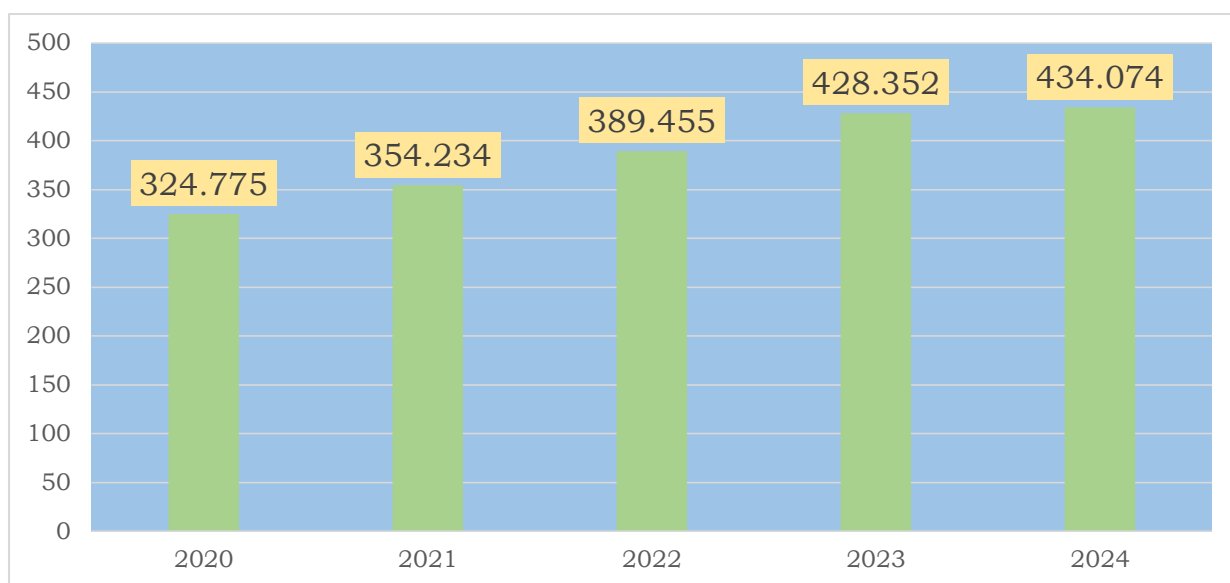
Sumber : Kabupaten Sikka Dalam Angka, 2025

Grafik 3.5 menunjukan indeks keparahan kemiskinan Kabupaten Sikka tahun 2023 sebesar 0,29 mengalami peningkatan sebesar 0,02 menjadi 0,31 di tahun 2024. Peningkatan ini menunjukan bahwa ketimpangan di antara penduduk miskin semakin melebar, yang berarti Sebagian kelompok miskin mengalami perbaikan, namun Sebagian lainnya khususnya kelompok sangat miskin semakin tertinggal. Kondisi ini menegaskan perlunya strategi pengentasan kemiskinan yang lebih terarah dan inklusif, tidak hanya menyasar penduduk miskin secara umum tetapi juga menargetkan kelompok paling rentan dan sulit keluar dari kemiskinan ekstrem.

3.5. GARIS KEMISKINAN

Garis kemiskinan di Kabupaten Sikka dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 ditunjukkan pada Grafik 3.6.

Grafik 3.6
Garis Kemiskinan Kabupaten Sikka
Tahun 2020-2024



Sumber : Kabupaten Sikka Dalam Angka, 2025

Garis Kemiskinan (GK) mencerminkan nilai rupiah pengeluaran minimum yang diperlukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya selama sebulan, baik kebutuhan makanan maupun non-makanan. GK terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM).

Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran minimum untuk kebutuhan makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori per kapita per hari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll).

Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM) merupakan nilai pengeluaran minimum untuk kebutuhan non-makanan berupa perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan.

Selama 5 tahun terakhir, Kabupaten Sikka mencatat tren kenaikan garis kemiskinan yang konsisten. Pada tahun 2020, garis kemiskinan tercatat sebesar Rp324.775 per kapita per bulan. Angka ini terus meningkat setiap tahun menjadi Rp354.234 pada 2021, Rp389.455 di 2022, Rp428.352 pada 2023, hingga mencapai Rp434.074 pada 2024.

Secara kumulatif, terdapat kenaikan sekitar 33,6% dalam lima tahun terakhir. Kenaikan ini mencerminkan bahwa biaya hidup minimum yang harus dikeluarkan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti makanan, tempat tinggal, dan kebutuhan pokok lainnya terus mengalami peningkatan.

Beberapa faktor utama penyebab kenaikan ini antara lain:

- Inflasi harga pangan dan energi yang berdampak langsung pada konsumsi rumah tangga miskin.
- Kenaikan biaya transportasi dan perumahan.
- Ketidakstabilan ekonomi global yang menekan daya beli masyarakat.

Dampaknya cukup signifikan. Masyarakat yang sebelumnya hidup sedikit di atas garis kemiskinan kini berisiko jatuh ke dalam kategori miskin karena pengeluaran mereka tak lagi mencukupi standar baru. Hal ini bisa menyebabkan peningkatan jumlah penduduk miskin secara statistik, meskipun penghasilan mereka secara nominal tidak menurun.

Di sisi lain, hal ini menjadi peringatan bagi pemerintah bahwa bantuan sosial, upah minimum, dan program pemberdayaan masyarakat perlu disesuaikan dengan dinamika kebutuhan riil di lapangan. Jika tidak, ketimpangan sosial bisa semakin melebar, dan kelompok rentan semakin sulit keluar dari jerat kemiskinan.

3.6. PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Pemerintah Kabupaten Sikka terus berupaya melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan melalui berbagai program/kegiatan yang mendorong pengentasan kemiskinan di wilayah Kabupaten Sikka.

Sebaran program/kegiatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sikka dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, antara lain:

1. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, melaksanakan 1 program yaitu Pengelolaan Pendidikan;
2. Dinas Kesehatan, melaksanakan 1 program yaitu Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat;
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, melaksanakan 1 program yaitu Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah;
4. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan, melaksanakan 4 program yaitu Pengembangan Perumahan, Kawasan Permukiman, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh, dan Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU);
5. Dinas Sosial, melaksanakan 3 program yaitu Pemberdayaan Sosial, Rehabilitasi Sosial, dan Perlindungan dan Jaminan Sosial;
6. Dinas Ketahanan Pangan, melaksanakan 2 program yaitu Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat dan Penanganan Kerawanan Pangan;
7. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, melaksanakan 3 program yaitu Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Perempuan, dan Pemenuhan Hak Anak (PHA);
8. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, melaksanakan 4 program yaitu Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, Pengelolaan Profil Kependudukan;
9. Dinas Perhubungan, melaksanakan 1 program yaitu Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ);

10. Dinas Perikanan, melaksanakan 3 program yaitu Pengelolaan Perikanan Tangkap, Pengelolaan Perikanan Budidaya, dan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
11. Dinas Pertanian, melaksanakan 2 program yaitu Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian dan Penyuluhan Pertanian;
12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, melaksanakan 2 program yaitu Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat dan Administrasi Pemerintahan Desa;
13. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, melaksanakan 3 program yaitu Penempatan Tenaga Kerja, Hubungan Industrial, dan Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja;
14. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, melaksanakan 1 program yaitu Pembinaan Perpustakaan; dan
15. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, melaksanakan 1 program yaitu Penanggulangan Bencana.

Program yang dilaksanakan mencakup bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin, serta penyediaan akses terhadap layanan dasar seperti Pendidikan, Kesehatan, air bersih, dan perumahan. Tujuan utama dari program ini adalah untuk menurunkan jumlah penduduk miskin, mencegah masyarakat rentan jatuh ke dalam kemiskinan, serta menciptakan mobilitas sosial ke atas bagi kelompok berpenghasilan rendah.

Pemerintah terus mendorong integrasi data agar penyaluran bantuan lebih tepat sasaran. Strategi yang dilakukan tidak hanya bersifat kuratif (penanganan langsung), tetapi juga preventif (pencegahan kemiskinan baru) dan promotif (peningkatan kapasitas Masyarakat).

Berbagai kebijakan diambil dalam upaya meminimalisir beban penduduk miskin dituangkan dalam pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2.

Matriks Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Sikka Tahun 2024

No.	Urusan Pemerintahan/Bidang	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Target 2024		Realisasi 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	
1	Pendidikan	Membangun dasar kebijakan dan sistem pelayanan SDM yang inklusif, responsif, dan berbasis nilai lokal.	Meningkatkannya intelektualitas dan karakter anak usia sekolah	Skor Literasi dan Numerasi Tingkat SD dan SMP	Pengelolaan Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah (APS) PAUD, SD, SMP	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Wilayah Kabupaten Sikka	672 Satuan Pendidikan	34,294,281,420	672 Satuan Pendidikan	34,299,698,840	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
						Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD, SD, SMP	Pembangunan Sarana dan Prasarana dan utilitas sekolah	Jumlah sarana/prasarana dan utilitas sekolah yang telah dibangun		33 Unit	5,817,742,800	32 Unit	5,401,366,200	
						Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD, SD, SMP	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas	Jumlah ruang kelas yang direhabilitasi sedang/berat		89 Ruang	7,600,160,904	89 Ruang	7,177,748,590	
						Angka Putus Sekolah	Rehabilitasi sedang/berat sarana, prasarana dan utilitas sekolah	Jumlah sarana, prasarana dan utilitas sekolah yang telah direhabilitasi		15 Unit	992,973,680	15 Unit	980,657,000	

						Persentase Satuan PAUD yang melaksanakan layanan HI	Pembangunan Sarana dan Prasarana dan utilitas sekolah	Jumlah sarana/prasarana dan utilitas sekolah yang telah dibangun		7 Unit	869,084,600	7 Unit	830,620,000	
							Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	Jumlah ruang kelas yang telah direhabilitasi sedang/berat		49 Ruang	5,169,719,001	45 Ruang	4,559,149,750	
							Rehabilitasi sedang/berat sarana, prasarana dan utilitas sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Direhabilitasi		4 Unit	307,778,409	4 Unit	307,204,900	
2	Kesehatan	Membangun dasar kebijakan dan sistem pelayanan SDM yang inklusif, responsif, dan berbasis nilai lokal.	Meningkatkan Kualitas Kesehatan Keluarga	Jumlah Kematian Ibu	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Proporsi Fasilitas Kesehatan sesuai standar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Wilayah Kabupaten Sikka	5398 Orang	820,829,600	3834 Orang	687,824,020	Dinas Kesehatan
				Jumlah Kematian Balita		Angka Kematian Bayi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		5153 Orang	1,180,004,811	4035 Orang	981,575,126	

				Prevalensi Stunting		Prevalensi Wasting	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		4906 Orang	26,842,080	4001 Orang	25,180,200	
				Cakupan Penerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis		Persentase Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		60435 Orang	1,516,427,840	52901 Orang	1,199,126,788	
				Cakupan Imunisasi Bayi Lengkap		Prevalensi Depresi pada usia ≥ 15 tahun	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		209119 Orang	8,300,000	305103 Orang	4,620,000	
				Cakupan Kepesertaan Aktif Jaminan Kesehatan Nasional		Prevalensi Obesitas ≥ 18 tahun	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		22192 Orang	20,049,840	24000 Orang	19,630,800	

				Angka Keberhasilan Pengobatan TB		Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		2529 Orang	520,246,896	6092 Orang	520,246,600	
				Persentase Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar		Proporsi fasyankes terintegrasi SIKN	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		4077 Orang	1,317,112,600	4345 Orang	1,230,170,856	
				Proporsi Penduduk dengan Aktivitas Fisik Cukup		Cakupan Imunisasi Rutin Lengkap	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		6339 Orang	256,510,000	5893 Orang	197,453,763	
						Penurunan Angka Kematian Dengue	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		312 Dokumen	1,719,710,000	312 Dokumen	996,299,752	

							Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		50 Orang	41,400,000	123 Orang	40,380,000	
							Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		312 Dokumen	5,128,582,161	312 Dokumen	4,245,878,036	
							Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat		12 Dokumen	46,841,959,246	12 Dokumen	36,257,493,988	
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Memperkuat fondasi infrastruktur dasar yang inklusif, tangguh, dan terintegrasi, melalui penataan tata ruang,	Meningkatkan Akses dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang merata dan berkelanjutan	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur Ke PU an	Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPALD dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun	Wilayah Kabupaten Sikka	1 Dokumen	20,549,970	1 Dokumen	13,600,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

4	Perumahan dan Kawasan Permukiman	Memperkuat fondasi infrastruktur dasar yang inklusif, tangguh, dan terintegrasi, melalui penataan tata ruang,	Meningkatkan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	Pengembangan Perumahan	Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	Wilayah Kabupaten Sikka	5 Unit Rumah	164,660,070	6 Unit Rumah	164,342,000	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
							Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun		2 Unit Rumah	148,087,230	2 Unit Rumah	148,592,000	
					Kawasan Permukiman	Persentase Luas Kawasan Kumuh dibawah 10 Ha yang Ditangani	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki		1 Unit Rumah	180,000,000	1 Unit Rumah	177,210,000	

					Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase Penurunan RTLH MBR diluar Kawasan Permukiman Kumuh	Perbaikan RTLH untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Kumuh dengan Luas di Bawah 10 Ha	Jumlah RTLH untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Kumuh dengan Luas di Bawah 10Ha yang diperbaiki		21 Unit	453,151,140	21 Unit	268,698,520	
					Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase Perumahan yang Sudah Dilengkapi PSU	Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk menunjang fungsi hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian		1 Lokasi	12,970,000	1 Lokasi	12,168,720	

5	Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	Membangun fondasi tata Kelola pemerintah melalui optimalisasi potensi daerah, penyalarsan dan penegakkan regulasi pusat dan daerah, serta peningkatan pengawasan dan akuntabilitas	Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat	Indeks Penyelenggaraan Trantibulinmas	Penanggulangan Bencana	Persentase cakupan penanganan tanggap daurat bencana	Sosialisasi, Komunikasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	Wilayah Kabupaten Sikka	600 Orang	153,618,200	600 Orang	138,379,185	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
						Persentase penanganan tanggap darurat bencana	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		12 Orang	212,428,790	12 Orang	180,468,420	
						Persentase penanganan pasca bencana								

6	Sosial	Membangun dasar kebijakan dan sistem pelayanan SDM yang inklusif, responsif, dan berbasis nilai lokal.	Meningkatkan Kesejahteraan Sosial yang Inklusif	Persentase Penduduk Miskin yang tergradiasi	Pemberdayaan Sosial	Persentase TKS/Relawan Sosial yang melaksanakan penangan korban bencana	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Wilayah Kabupaten Sikka	21 Keluarga	135,999,660	0	103,935,860	Dinas Sosial
						Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang meningkatkan kompetensi dalam pelayanan sosial	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota		5 Lembaga	64,027,190	5 Lembaga	70,736,870	
						Persentase lembaga di bidang Kesejahteraan sosial yang meningkatkan kualitasnya dalam pelayanan sosial	Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota							

						Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di luar Panti	Penyediaan Permakanaan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanaan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota		31 Orang	68,887,610	31 Orang	64,478,396	
					Rehabilitasi Sosial	Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di luar Panti	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota		76 Orang	79,426,870	76 Orang	98,153,000	
						Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di luar Panti	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		100 Orang	47,310,200	0	15,670,800	

						Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota		115 Orang	104,307,750	56 Orang	30,607,600	
						Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota		10 Orang	27,263,560	0	333,400	
						Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota		10 Orang	23,380,000	8 Orang	17,278,920	
					Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase PPKS yang terpenuhi kebutuhan sosial	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	18,541,240	12 Orang	18,416,240	

							Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota		34673 Keluarga	184,269,340	11726 Keluarga	132,818,980	
							Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		21000 Keluarga	282,238,080	10961 Keluarga	91,835,320	
7	Tenaga Kerja	Membangun dasar kebijakan dan sistem pelayanan SDM yang inklusif, responsif, dan berbasis nilai lokal.	Meningkatkan Kesempatan dan Produktivitas Tenaga Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan di Dalam Negeri Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Luar Negeri	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	Wilayah Kabupaten Sikka	100 Orang	37,494,910	61 Orang	6,485,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

				Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja (TPTK)	Hubungan Industrial	Persentase pemberi kerja yang menerapkan perlindungan hak pekerja dan dialog sosial di dalam negeri dan luar negeri	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan		20 Laporan	186,656,000	20 Laporan	103,278,280	
					Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Kontribusi PDRB menurut lapangan usaha	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n		870 Orang	7,560,520,510	553 Orang	7,429,922,052	

8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Membangun dasar kebijakan pelayanan SDM yang inklusif, responsif, dan berbasis nilai lokal.	Meningkatkannya Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak	Indeks Pemberdayaan Gender	Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	Wilayah Kabupaten Sikka	1 Lembaga	15,000,080	1 Lembaga	12,154,580	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
					Perempuan	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota			12 Layanan	34,999,960	0	-	
					Perlindungan Perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota						

				Indeks Perlindungan Anak	Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Skor Kabupaten Layak Anak	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha		12 Organisasi	34,999,640	9 Organisasi	21,473,450	
--	--	--	--	-----------------------------	--------------------------	------------------------------	---	--	--	---------------	------------	--------------	------------	--

9	Pangan	Membangun fondasi pengembangan sektor primer untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi biru	Meningkatkannya Ketersediaan dan Cadangan Pangan yang Berkualitas dan Terjangkau	Indeks Ketahanan Pangan	Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (SKOR PPH)	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Wilayah Kabupaten Sikka	2 Laporan	1,125,060,101	2 Laporan	1,115,632,341	Dina Ketahanan Pangan
					Penanganan Kerawanan Pangan	Desa rawan pangan yang tertangani (%)	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan		1 Dokumen	24,686,640	1 Dokumen	23,636,449	

10	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Membangun fondasi tata Kelola pemerintah melalui optimalisasi potensi daerah, penyelarasan dan penegakkan regulasi pusat dan daerah, serta peningkatan pengawasan dan akuntabilitas	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kependudukan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan	Pendaftaran Penduduk	Persentase Kepemilikan E-KTP	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	Wilayah Kabupaten Sikka	2 Dokumen	9,496,800	2 Dokumen	9,450,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
						Persentase Kepemilikan KIA								
					Pencatatan Sipil	Persentase akta kematian, akta kelahiran, akta perkawinan, dan akta perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil		150 Laporan	38,100,000	150 Laporan	38,050,000	

						Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil		25 Laporan	12,500,000	20 Laporan	12,390,000	
					Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan		1 Dokumen	885,688,455	1 Dokumen	878,603,865	
						Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan		12 Dokumen	47,395,440	12 Dokumen	46,987,460	
						Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	Jumlah Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan		2 Dokumen	7,561,280	2 Dokumen	7,536,350	
					Pengelolaan Profil Kependudukan	Cakupan pengelolaan profil kependudukan	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota		2 Dokumen	4,349,660	2 Dokumen	4,309,420	

11	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Membangun fondasi pengembangan sektor primer untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi	Meningkatkan Kapasitas Pemberdayaan Masyarakat dan Kemandirian Desa secara berkelanjutan	Indeks Desa	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase fasilitasi pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa	Fasilitasi Tim Penggerak Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Wilayah Kabupaten Sikka	23 Dokumen	88,824,968	23 Dokumen	58,834,583	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
					Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase aparatur desa dan anggota BPD yang ditingkatkan kapasitasnya	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa		181 Dokumen	39,999,940	181 Dokumen	39,919,940	
						Persentase fasilitasi tata kelola desa	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa		181 Dokumen	49,999,440	181 Dokumen	49,835,470	
							Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa		181 Dokumen	79,999,300	181 Dokumen	77,799,375	

12	Perhubungan	Meningkatnya kualitas dan keterjangkauan aksesibilitas infrastruktur yang merata dan berkelanjutan	Meningkatnya Kualitas Layanan Transportasi yang Nyaman, Aman dan Terjangkau	Rasio Konektivitas	Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Konektivitas Darat	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	Wilayah Kabupaten Sikka	6 Unit	30,237,200	6 Unit	34,940,000	Dinas Perhubungan
13	Perpustakaan	Membangun dasar kebijakan dan sistem pelayanan SDM yang inklusif, responsif, dan berbasis nilai lokal.	Meningkatnya Literasi Masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	Pembinaan Perpustakaan	Nilai Tingkat Pembinaan Masyarakat	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	Wilayah Kabupaten Sikka		142,089,850		106,195,257	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

14	Perikanan	Membangun fondasi pengembangan sektor primer untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi	Meningkatkan kesejahteraan nelayan dan pembudidaya perikanan	Pertumbuhan Pendapatan Nelayan	Pengelolaan Perikanan Tangkap	Produksi perikanan tangkap	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	Wilayah Kabupaten Sikka	150 Orang	10,725,031,499	150 Orang	10,584,534,694	Dinas Perikanan
				Pertumbuhan Pendapatan Pembudidaya Ikan	Pengelolaan Perikanan Budidaya	Produksi perikanan budidaya	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas		3 Kelompok	309,398,400	3 Kelompok	306,678,300	
					Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase produk perikanan yang telah dijual dalam bentuk olahan	Peningkatan ketersediaan ikan untuk konsumsi dan usaha pengolahan dalam 1 (satu) daerah Kab/Kota	Jumlah peningkatan ketersediaan ikan untuk konsumsi dan usaha pengolahan dalam 1 (satu) daerah Kab/Kota		12 Ton	1,881,344,700	12.50 Ton	1,583,947,029	
15	Pertanian	Membangun fondasi pengembangan sektor primer untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi	Meningkatkan Kesejahteraan Petani	Pertumbuhan Produksi Pertanian	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Produksi pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Wilayah Kabupaten Sikka	7 Laporan	455,000,000	7 Laporan	366,520,000	Dinas Pertanian

						Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian		3 Laporan	516,196,030	3 Laporan	477,878,936	
					Penyuluhan Pertanian	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya		2.400 Unit	216,237,300	2.000 Unit	183,917,000	
						Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi		3 Unit	439,456,290	3 Unit	386,965,320	
TOTAL									141,829,157,181		125,677,924,591		

Sumber : Olahan Bapperida Kabupaten Sikka, 2025

Dari Tabel 3.2, diketahui bahwa anggaran penanggulangan kemiskinan pada tahun 2024, sebesar Rp141.829.157.181, terealisasi sebesar Rp125.677.924.591 atau 88,61%. Terdapat 32 program dan 67 sub kegiatan yang telah dilaksanakan di Kabupaten Sikka dalam rangka Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, antara lain:

1. Program pengelolaan pendidikan, dengan sub kegiatan :
 - 1) Pengelolaan Dana BOS sekolah Dasar;
 - 2) Pembangunan sarana dan prasarana dan utilitas sekolah (SD);
 - 3) Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas (SD);
 - 4) Rehabilitasi sedang/berat sarana, prasarana dan utilitas sekolah (SD);
 - 5) Pembangunan sarana dan prasarana dan utilitas sekolah (SMP);
 - 6) Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah (SMP);
 - 7) Rehabilitasi sedang/berat sarana, prasarana dan utilitas sekolah (SMP);
2. Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat, dengan sub kegiatan :
 - 1) Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil;
 - 2) Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin;
 - 3) Pengelolaan Pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
 - 4) Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
 - 5) Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia produktif;
 - 6) Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
 - 7) Pengelolaan pelayanan Kesehatan penderita diabetes melitus;
 - 8) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis;
 - 9) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV;
 - 10) Pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan;
 - 11) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA;
 - 12) Pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular;
 - 13) Pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat.

3. Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah, dengan sub kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota.
4. Program pengembangan perumahan, dengan sub kegiatan :
 - 1) Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana.
 - 2) Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana.
5. Program kawasan permukiman, dengan sub kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni.
6. Program perumahan dan kawasan permukiman kumuh, dengan sub kegiatan Perbaikan RTLH untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Kumuh dengan Luas di Bawah 10 Ha.
7. Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU), dengan sub kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk menunjang fungsi hunian.
8. Program pemberdayaan sosial, dengan sub kegiatan :
 - 1) Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota;
 - 2) Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota.
9. Program rehabilitasi sosial, dengan sub kegiatan :
 - 1) Penyediaan permakanan;
 - 2) Penyediaan alat bantu;
 - 3) Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan Masyarakat;
 - 4) Pemberian layanan data dan pengaduan;
 - 5) Pemberian Layanan Kedaruratan;
 - 6) Pemberian Layanan Rujukan.
10. Program perlindungan dan jaminan sosial, dengan sub kegiatan :
 - 1) Penjangkauan Anak-Anak Terlantar;
 - 2) Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota;

- 3) Fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga.
11. Program penempatan tenaga kerja, dengan sub kegiatan Job Fair/Bursa Kerja.
 12. Program hubungan industrial, dengan sub kegiatan Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan.
 13. Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja dengan sub kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi.
 14. Program Pengarusutamaan gender dan pemberdayaan Perempuan, dengan sub kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota.
 15. Program perlindungan Perempuan, dengan sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota.
 16. Program Pemenuhan hak anak, dengan sub kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota.
 17. Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan Masyarakat, dengan sub kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal.
 18. Program penanganan kerawanan pangan, dengan sub kegiatan Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan.
 19. Program pendaftaran penduduk, dengan sub kegiatan Pengadaan dokumen kependudukan selain blangko KTP-EL, formulir dan buku terkait pendaftaran penduduk sesuai dengan kebutuhan.
 20. Program pencatatan sipil, dengan sub kegiatan :
 - 1) Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil;
 - 2) Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil.

21. Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan, dengan sub kegiatan :
 - 1) Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan;
 - 2) Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan;
 - 3) Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
22. Program pengelolaan profil kependudukan, dengan sub kegiatan Penyediaan data kependudukan Kabupaten/Kota.
23. Program pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan, Lembaga adat dan Masyarakat hukum adat, dengan sub kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga.
24. Program administrasi pemerintahan desa, dengan sub kegiatan :
 - 1) Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa;
 - 2) Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa;
 - 3) Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa.
25. Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ), dengan sub kegiatan Pengendalian dan pengawasan ketersediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota.
26. Program penanggulangan bencana, dengan sub kegiatan :
 - 1) Sosialisasi, Komunikasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (per jenis bencana);
 - 2) Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota.
27. Program pembinaan perpustakaan, dengan sub kegiatan Sosialisasi budaya baca dan literasi pada satuan pendidikan dasar dan pendidikan khusus serta masyarakat.
28. Program pengelolaan perikanan tangkap, dengan sub kegiatan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil.

29. Program pengelolaan perikanan budidaya, dengan sub kegiatan Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil.
30. Program pengelolaan dan pemasaran hasil perikanan, dengan sub kegiatan Peningkatan ketersediaan ikan untuk konsumsi dan usaha pengolahan dalam 1 (satu) daerah Kab/Kota.
31. Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian, dengan sub kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian.
32. Program penyuluhan pertanian, dengan sub kegiatan :
 - 1) Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa;
 - 2) Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota.

Analisis Belanja Daerah untuk Penanggulangan Kemiskinan

Analisis belanja daerah untuk penanggulangan kemiskinan dilakukan terhadap belanja program regular, dikaitkan dengan prioritas masalah kemiskinan yang dihadapi.

Strategi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sikka dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian yaitu :

➤ **Pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin**

Program pengurangan beban pengeluaran masyarakat dari kondisi kemiskinan melalui program-program antara lain:

- Pengelolaan pendidikan;
- Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat;
- Penanggulangan bencana;
- Pemberdayaan sosial;
- Rehabilitasi sosial;
- Perlindungan dan jaminan sosial;
- Hubungan industrial;
- Pengarusutamaan gender dan pemberdayaan Perempuan;
- Perlindungan Perempuan;

- Pendaftaran penduduk;
- Pencatatan sipil;
- Pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
- Pengelolaan profil kependudukan;

➤ **Meminimalkan wilayah kantong-kantong kemiskinan**

Program untuk meminimalkan wilayah kantong kemiskinan melalui program-program antara lain:

- Pengelolaan pendidikan;
- Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah;
- Pengembangan perumahan;
- Kawasan permukiman;
- Perumahan dan Kawasan permukiman kumuh;
- Peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU);
- Penanganan kerawanan pangan;
- Administrasi pemerintahan desa;
- Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ).

➤ **Meningkatkan pendapatan**

Program yang dilaksanakan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dari kondisi kemiskinan melalui program-program antara lain :

- Pemberdayaan sosial;
- Penempatan tenaga kerja;
- Pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja;
- Pemenuhaan Hak Anak (PHA);
- Peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan Masyarakat;
- Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan Masyarakat hukum adat;
- Pembinaan perpustakaan;
- Pengelolaan perikanan tangkap;
- Pengelolaan perikanan budidaya;
- Pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian;
- Penyuluhan pertanian.



**Laporan Pelaksanaan
Penanggulangan Kemiskinan Daerah
Tahun 2024**

BAB IV

RENCANA TINDAK LANJUT

BAB IV

RENCANA TINDAK LANJUT

Kemiskinan merupakan sebuah permasalahan yang kompleks yang memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistemik, terpadu dan menyeluruh. Secara operasional penanganan permasalahan kemiskinan harus dilakukan secara terkoordinasi yang melibatkan intervensi lintas sektor dan menjadi tanggung jawab multi pihak untuk meningkatkan sinergitas pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan guna menjamin efisiensi dan efektivitas implementasi penanggulangan kemiskinan.

Pemerintah Kabupaten Sikka berkomitmen untuk terus memperkuat langkah-langkah strategis dalam menanggulangi kemiskinan. Oleh karena itu, rencana tindak lanjut berikut disusun sebagai panduan pelaksanaan program ke depan yang lebih tepat sasaran, terkoordinasi, dan berkelanjutan. Efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan terus diupayakan, melalui :

a. Meningkatkan kualitas data base kemiskinan, melalui

- ✚ Pemutakhiran data oleh Perangkat Daerah dan Badan Pusat Statistik (verifikasi dan validasi terhadap data kemiskinan);

- ✚ Mengakomodir kelompok masyarakat miskin yang belum terdata.

Satu data base kemiskinan (single data) yang menjadi acuan bagi multi pihak dalam implementasi program/kegiatan penanggulangan kemiskinan. pemetaan dan analisis kelompok masyarakat miskin

Hasil pemetaan dan analisis kelompok masyarakat miskin sangat penting untuk menetapkan intervensi program penanggulangan kemiskinan sesuai dengan kondisi kelompok masyarakat miskin. Pemetaan dan analisis kelompok masyarakat miskin diharapkan dapat memberikan data dan informasi kelompok masyarakat miskin yang dalam upaya penanggulangannya dapat dilakukan melalui pendekatan perlindungan dan pendekatan pemberdayaan.

- b. Penyusunan peta kantong kemiskinan berbasis spasial, untuk mengarahkan intervensi berbasis wilayah.
- c. Melakukan Rapat Koordinasi Perangkat Daerah terkait penanggulangan Kemiskinan, untuk sinkronisasi program dan anggaran.
- d. Melakukan Evaluasi efektivitas program berdasarkan indikator outcome, untuk penilaian dampak program terhadap kesejahteraan.
- e. Replikasi program pemberdayaan berbasis hasil pelatihan kerja dan potensi lokal melalui pendampingan hingga tahap pasca latih.
- f. Penyusunan rencana aksi daerah penanggulangan kemiskinan, untuk menjadi panduan dalam penanggulangan kemiskinan daerah.
- g. Pembentukan Tim Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tingkat Desa/Kelurahan dan Kecamatan.
- h. Penyusunan Standar Operasional Prosedur penanganan pengaduan masyarakat.



**Laporan Pelaksanaan
Penanggulangan Kemiskinan Daerah
Tahun 2024**

BAB V

PENUTUP

- 5.1. Kesimpulan**
- 5.2. Rekomendasi**

BAB V

PENUTUP

5.1. KESIMPULAN

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Sikka pada tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 2.080 jiwa, Pemerintah Kabupaten Sikka telah menunjukkan komitmen tinggi dalam percepatan penanggulangan kemiskinan melalui pelaksanaan berbagai program lintas perangkat daerah. Sebanyak 15 perangkat daerah melaksanakan beragam program yang mencakup bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin, serta penyediaan akses layanan dasar (pendidikan, kesehatan, air bersih, perumahan, dan transportasi). Program yang dilaksanakan telah mencakup tiga strategi utama:

- Pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin, melalui layanan dasar (pendidikan, kesehatan, jaminan sosial, dokumen kependudukan).
- Pemangkasan kantong kemiskinan, melalui perbaikan lingkungan fisik (perumahan, PSU, sanitasi, transportasi).
- Peningkatan pendapatan masyarakat miskin, melalui pelatihan, pemberdayaan ekonomi lokal, dan sektor pertanian, kelautan, serta tenaga kerja.

Meskipun program menysasar berbagai aspek kemiskinan, tantangan masih dihadapi, antara lain:

- Perlunya pemetaan kantong kemiskinan lebih presisi.
- Perlunya penguatan sinergi antar program dan OPD.
- Perlunya integrasi data dan pengukuran dampak berbasis indikator kesejahteraan.

Strategi yang digunakan bersifat kuratif, preventif, dan promotif, sehingga berupaya tidak hanya mengurangi jumlah penduduk miskin, tetapi juga mencegah kemiskinan baru dan mendorong mobilitas sosial. Meskipun upaya telah dilakukan secara komprehensif, efektivitas program masih dihadapkan pada tantangan seperti belum optimalnya integrasi data kemiskinan, fragmentasi program antar perangkat daerah, dan keterbatasan daya jangkauan program ke wilayah terpencil.

5.2 REKOMENDASI

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan serius yang perlu ditangani secara terstruktur, terintegrasi dan berkelanjutan, oleh karena itu yang harus dilakukan Pemerintah Kabupaten Sikka adalah :

1. Menyusun Rencana Aksi Daerah penanggulangan kemiskinan sebagai dokumen yang mengintegrasikan seluruh rencana dan pelaksanaan program serta kegiatan penanggulangan kemiskinan, baik dokumen tahunan maupun lima tahunan.
2. Optimalkan pelaksanaan program berbasis strategi tiga pilar dengan penajaman target dan sasaran, terutama pada wilayah-wilayah kantong kemiskinan.
3. Kembangkan sistem pemantauan dan evaluasi berbasis data spasial dan indikator hasil (output–outcome), bukan hanya serapan anggaran.
4. Tingkatkan kapasitas kelembagaan desa dan masyarakat dalam pengelolaan program kemiskinan berbasis pemberdayaan dan potensi lokal.
5. Perkuat keberlanjutan program-program produktif (UMKM, pertanian, perikanan) agar masyarakat tidak kembali jatuh miskin.
6. Membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di tingkat Desa/Kelurahan dan Kecamatan.
7. Menyusun SOP penanganan pengaduan masyarakat terkait pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan.



SEKRETARIAT
TKPK

